

Pendidikan Inklusif Sebagai Ruang Akses Pendidikan Masyarakat Miskin di Indonesia

Reski P¹, M. Tahir Kasnawi², Hasbi³

¹ Universitas Hasanuddin; purnamasarirezky8@gmail.com

² Universitas Hasanuddin; tahirkasnawi@yahoo.com

³ Universitas Hasanuddin; hasbifisip@unhas.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Keywords:</i> Inclusive Education, Access to Education, Poor Communities. <i>Article history:</i> Received 2025-05-10 Revised 2025-05-12 Accepted 2025-05-15	<i>Inclusive education has become increasingly relevant in discussions on efforts to expand access to education for poor communities in Indonesia. Although education is often positioned as a means of social mobility, realities on the ground show that disadvantaged groups continue to face various structural barriers in obtaining equitable and sustainable education. This article aims to examine how inclusive education can function as a space for educational access for poor communities, while also identifying the challenges of its implementation within the national education system. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) method by reviewing scholarly articles retrieved from Google Scholar. The findings indicate that poverty remains a major factor influencing low levels of educational participation, persistence, and quality. Inclusive education in this study is understood not merely as the integration of students with special needs into regular schools, but as an approach that seeks to create a more equitable education system for socially and economically vulnerable groups. The literature review analysis further shows that inclusive education is not only an educational agenda, but also part of broader efforts toward sustainable social development. Therefore, strengthening inclusive education needs to be carried out systematically and continuously in order to address educational inequality in a more substantive manner. Access to inclusive education for poor communities in Indonesia remains a structural issue that requires a multidimensional approach.</i> <i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i>
INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Kata Kunci:</i> Pendidikan Inklusif, Akses Pendidikan, Masyarakat Miskin. <i>Riwayat artikel:</i> Diterima 2025-05-10 Revisi 2025-05-12 Disetujui 2025-05-15	<i>Inclusive education is a strategic and relevant issue to discuss in the context of efforts to expand access to education for the poor in Indonesia. Although education is often positioned as a means of social mobility, the reality on the ground shows that the poor still face various structural barriers to obtaining a proper education. This article aims to examine how inclusive education functions as a space for educational access for the poor, while also identifying challenges to its implementation in the national education system. This research uses the Systematic Literature Review (SLR) method by examining scientific articles obtained through Google Scholar. The results of the study indicate that poverty remains a major factor influencing low participation, desire, and quality of education. Inclusive education, in this case, is not simply the integration of students with special needs into regular schools, but rather an approach that seeks to create a more equitable education system for socially and economically vulnerable groups. The analysis of this literature review also shows that inclusive education is not merely an educational agenda, but rather part of sustainable social development efforts. Therefore, strengthening inclusive education needs to be carried out systematically and sustainably to effectively address educational disparities. Access to inclusive education for the poor in Indonesia is a structural problem that requires a multidimensional approach.</i>

Penulis Koresponden :

Reski P

Universitas Hasanuddin; purnamasarirezky8@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan dianggap sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kualitas hidup dan memperluas pilihan masa depan. Di Indonesia, Pendidikan juga diharapkan menjadi instrument pemerataan sosial yang diharapkan bisa menjembatani kesenjangan antar kelompok di dalam masyarakat. Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Pada kenyataannya, tidak semua individu memiliki peluang yang sama untuk mengakses Pendidikan, apalagi Pendidikan yang benar-benar memberikan ruang partisipasi dan rasa aman bagi semua peserta didik.

Padahal seperti yang dikutip pada pandangan Ummah (2024) bahwa Pendidikan adalah kunci penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat memiliki akses ke pendidikan yang baik, mereka akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan taraf hidupnya. Contohnya, dengan pendidikan yang baik, orang bisa mencari pekerjaan yang lebih baik atau bahkan membuka usaha sendiri. Pemerintah dan masyarakat perlu memastikan bahwa pendidikan bisa diakses oleh semua orang, tidak hanya di kota, tetapi juga di desa-desa terpencil.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Sehingga untuk menunjang hal tersebut diperlukan akses pendidikan. Menurut Iffani & Pitoyo (2017) Akses pendidikan wajib diberikan kepada anak baik oleh pemerintah maupun orangtua/wali. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah baik daerah maupun pusat wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin tersedianya dana dan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun tanpa diskriminasi. Konvensi *Education for All (EFA)* merupakan hasil kesepakatan dari penyelenggaraan *World Education Forum* di Dakar Senegal pada tahun 2000. Indonesia merupakan salah satu negara dari 164 negara yang menyetujui dan menandatangani konvensi tersebut. Tujuan ke-4 dari *Sustainable Development Goals (SDG's)* adalah memastikan pendidikan inklusif dan berkulaitas untuk semua dan mendukung pembelajaran seumur hidup.

Akses pendidikan sering kali dipahami secara sempit sebagai ketersediaan sekolah atau kebijakan wajib belajar. Padahal, bagi sebagian kelompok masyarakat, persoalan pendidikan justru dimulai setelah sekolah tersedia. Hambatan ekonomi, jarak geografis, relasi sosial yang timpang, hingga pengalaman diskriminatif di lingkungan sekolah menjadi faktor yang secara nyata membatasi akses pendidikan. Kondisi ini membuat pendidikan

tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga arena sosial yang merefleksikan ketimpangan yang ada di masyarakat (Ompusunggu et al., 2023).

Akses pendidikan yang merata tentu idaman bagi semua warga Indonesia. Pendidikan inklusif menjadi istilah populer untuk pendidikan merata tanpa melihat perbedaan yang ada. Pendidikan inklusif bukan semata-mata berkaitan dengan keberadaan peserta didik yang beraneka ragam dalam satu ruang kelas, tetapi berkaitan dengan system Pendidikan yang mampu merespon perbedaan tersebut secara adil. Inklusif menuntut adanya perubahan cara pandang sekolah terhadap peserta didik, dari yang sebelumnya seragam menjadi lebih memahami bahwa terdapat perbedaan latar belakang sosial, ekonomi dan kemampuan belajar. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai subjek Pendidikan, bukan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri sepenuhnya dengan sistem yang ada.

Di Indonesia, pendidikan inklusif telah menjadi bagian dari agenda kebijakan nasional. Namun, pada tingkat praktik, akses pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Banyak sekolah belum memiliki sumber daya yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam. Guru sering kali dituntut untuk menerapkan prinsip inklusi, tetapi tidak dibekali pelatihan yang cukup. Akibatnya, inklusi dipahami sebatas pemenuhan administratif, bukan sebagai perubahan budaya belajar di sekolah (Nahampun et al., 2024).

Selain persoalan kelembagaan, faktor sosial di luar sekolah juga berpengaruh besar. Stigma terhadap anak dari keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus, atau kelompok sosial tertentu masih ditemukan dalam interaksi sehari-hari. Stigma ini tidak jarang terbawa ke ruang kelas dan memengaruhi relasi antarpeserta didik maupun relasi antara guru dan siswa. Dalam situasi seperti ini, keberadaan sekolah justru berpotensi memperkuat rasa terpinggirkan, alih-alih menjadi ruang yang memberdayakan (Nusaibah et al., 2025).

Dari sudut pandang sosiologi pendidikan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan inklusif tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan relasi kuasa yang bekerja di dalam masyarakat. Sekolah bukanlah institusi yang netral; ia membawa nilai, norma, dan praktik sosial yang sering kali merefleksikan kepentingan kelompok dominan. Ketika sistem pendidikan tidak sensitif terhadap realitas sosial peserta didik, pendidikan berisiko mereproduksi ketimpangan sosial yang sudah ada, bukan menguranginya (Biantoro & Rahmatullah, 2024).

Di Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam pemerataan akses pendidikan masih sangat signifikan, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga pengajar, serta minimnya fasilitas pembelajaran menjadi isu utama yang menghambat tercapainya pemerataan pendidikan. Sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai

Pancasila, pemerataan pendidikan menjadi bagian dari implementasi sila ke-2 dan ke-5, yang menekankan pentingnya keadilan dan empati dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat. Hal ini juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan ke-4, yaitu *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas), yang bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas bagi semua, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat (Vega et al., 2024).

Salah satu penyebab utama ketimpangan akses pendidikan tersebut adalah ketimpangan sosial ekonomi yang masih tinggi. Perbedaan dalam hal pendapatan, tingkat pendidikan orang tua, kepemilikan aset produktif, serta kondisi pekerjaan sangat memengaruhi kemampuan keluarga untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung seperti uang sekolah maupun tidak langsung seperti transportasi dan perlengkapan belajar, menjadi beban berat bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif, seperti kawasan padat dan rentan sosial, juga turut memperburuk kualitas pembelajaran anak-anak dari kelompok marginal. Ketimpangan pendidikan yang dialami oleh masyarakat marginal tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial secara keseluruhan. Ketika sebagian besar kelompok masyarakat tertinggal dalam aspek pendidikan, maka peluang mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial akan semakin kecil. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya siklus kemiskinan antargenerasi yang sulit diputus. Pendidikan, yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial, justru menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan apabila akses terhadapnya tidak merata. Dengan demikian, pemerataan pendidikan menjadi krusial untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang berkeadilan (Efendi & Aini, 2025).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap Pendidikan yang berkualitas tidak merata, terutama bagi kelompok-kelompok yang secara historis termarginalisasi. Kondisi ini menciptakan eksklusivitas sosial, di mana individu atau kelompok tertentu terhalang dari kesempatan yang setara dalam pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka. Eksklusivitas sosial dalam ranah pendidikan termanifestasi ketika kelompok-kelompok tertentu mengalami hambatan aksesibilitas pendidikan akibat faktor-faktor struktural, sosial, dan ekonomi. Fenomena ini memperoleh signifikansi yang semakin besar dalam konteks global, di mana disparitas pendidikan berpotensi memperparah ketidakadilan sosial dan ekonomi (Al-Faiza et al., 2025). Kondisi tersebut merupakan suatu kondisi miris bagi dunia pendidikan.

Regulasi dan kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengurangi ketimpangan akses pendidikan. Di negara maju, kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan sosial telah diterapkan sejak lama. Sebagai contoh, di

Finlandia, pendidikan gratis dan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh daerah menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan semua warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Di sisi lain, negara berkembang sering kali menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan, seperti terbatasnya anggaran negara dan ketidakstabilan politik. Hal ini membuat pendidikan di negara berkembang tidak selalu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, dan kualitas pendidikan di beberapa daerah tetap rendah (Al-Faiza et al., 2025).

Pembahasan mengenai akses pendidikan inklusif menjadi relevan tidak hanya untuk menilai keberhasilan kebijakan pendidikan, tetapi juga untuk memahami bagaimana implementasi pendidikan di lapangan. Dengan memahami dinamika sosial yang memengaruhi akses pendidikan, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang tidak sekadar membuka pintu-pintu sekolah, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu yang masuk ke dalam sekolah tersebut memiliki ruang yang setara untuk tumbuh dan berdaya di dalamnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Systematic Literature Review (SLR) merupakan teknik untuk mengumpulkan, menguji secara kritis, mengintergrasikan dan mengumpulkan hasil bermacam kajian penelitian terhadap pertanyaan penelitian atau topik yang ingin didalami. Penelitian dimulai dengan menemukan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang nantinya akan diteliti. Pencarian study literatur dimulai dengan menggunakan database google scholar. Kata kunci yang digunakan adalah akses pendidikan, Pendidikan inklusif, Pendidikan masyarakat miskin dengan membatasi artikel dari tahun 2021 sampai 2025.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses pendidikan inklusif bagi masyarakat miskin merupakan isu krusial dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Berbagai literatur menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi faktor struktural yang memengaruhi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Pendidikan inklusif dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai integrasi peserta didik berkebutuhan khusus ke sekolah reguler, tetapi juga sebagai pendekatan sistemik untuk menjamin kesetaraan dalam memperoleh kesempatan belajar bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin, tanpa diskriminasi sosial dan ekonomi.

Sejumlah studi menegaskan bahwa kemiskinan berimplikasi langsung terhadap rendahnya partisipasi dan keberlanjutan pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Iffani & Pitoyo (2017) menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan multidimensional, seperti keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, lingkungan

sosial, dan rendahnya motivasi belajar. Meskipun akses pendidikan dasar secara formal telah mengalami peningkatan, kualitas akses tersebut belum sepenuhnya menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak miskin, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Temuan ini menegaskan bahwa akses pendidikan tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai kehadiran di sekolah, melainkan juga mencakup kemampuan peserta didik untuk bertahan dan berkembang dalam sistem pendidikan.

Berdasarkan tersebut, pendidikan inklusif dipandang sebagai strategi penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan berbasis kelas sosial di masyarakat. Pendidikan inklusif berlandaskan prinsip kesetaraan, partisipasi aktif, serta penyediaan dukungan individual sesuai kebutuhan peserta didik. Dea Mustika et al (2023) menegaskan bahwa pendidikan inklusif memberikan manfaat signifikan bagi anak-anak dari kelompok rentan, termasuk keluarga miskin, karena memungkinkan mereka belajar dalam lingkungan yang menghargai keberagaman dan mendorong interaksi sosial yang positif. Lingkungan belajar yang inklusif berpotensi meningkatkan rasa percaya diri, motivasi belajar, dan keterampilan sosial peserta didik yang selama ini kerap terhambat oleh kondisi sosial ekonomi.

Meskipun demikian, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius. Salah satu persoalan utama adalah kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Alvani & Indriyani (2024) menjelaskan bahwa pendidikan inklusif sering kali dipahami secara administratif dan normatif, tanpa disertai perubahan paradigma pembelajaran dan budaya sekolah. Kurikulum yang seragam dan metode pembelajaran yang belum diferensiatif menyebabkan peserta didik dari keluarga miskin tetap berada pada posisi kurang diuntungkan, meskipun secara formal telah terakomodasi dalam sistem pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif belum sepenuhnya menjawab persoalan keadilan pedagogis.

Penelitian yang dilakukan oleh Judijanto et al (2025) memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh komitmen kebijakan, alokasi sumber daya, pelatihan guru yang berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat. Pendidikan inklusif terbukti mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok terpinggirkan apabila diterapkan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sebaliknya, tanpa dukungan sistemik yang kuat, pendidikan inklusif berisiko menjadi kebijakan simbolik yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kesenjangan pendidikan.

Selain pendidikan formal, penulis juga menyoroti peran pendidikan alternatif berbasis komunitas dalam memperluas akses pendidikan inklusif bagi masyarakat miskin. Firnanda et al (2025) mengatakan bahwa model Sekolah Rakyat mampu menjangkau kelompok masyarakat yang tidak sepenuhnya terlayani oleh sistem pendidikan formal. Pendidikan

berbasis masyarakat dinilai lebih kontekstual, fleksibel, dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, sekaligus memperkuat partisipasi komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Model ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada peran aktif masyarakat sipil.

Sebenarnya jika ditelisik lebih jauh, beberapa penulis menempatkan pendidikan inklusif sebagai upaya sistematis untuk menjamin hak pendidikan bagi semua individu tanpa diskriminasi. Judijanto et al (2025) menekankan bahwa pendidikan inklusif memiliki potensi besar dalam memperkecil kesenjangan pendidikan, terutama bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam sistem pendidikan formal. Namun, mereka juga menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada komitmen politik dan kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak dapat dipahami hanya sebagai pendekatan pedagogis, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang memerlukan dukungan struktural.

Sementara itu, Lewa (2025) mengatakan bahwa pendidikan inklusif dalam kerangka hak asasi dan konstitusional warga negara. Analisisnya menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam tataran implementasi, meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Jika dibandingkan dengan temuan Judijanto dkk (2025) terlihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada absennya regulasi, melainkan pada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Hal ini memperkuat argumen bahwa pendidikan inklusif membutuhkan lebih dari sekadar regulasi formal.

Dari sisi kebijakan, Fatmawati et al et al (2025) menyoroti peran pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui berbagai program bantuan dan pembangunan infrastruktur. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif memiliki dampak positif dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi kelompok ekonomi lemah. Namun, jika dianalisis lebih lanjut, kebijakan tersebut cenderung masih berorientasi pada akses, bukan kualitas. Dengan kata lain, pemerintah relatif berhasil membuka pintu pendidikan, tetapi belum sepenuhnya memastikan bahwa pendidikan yang diterima benar-benar inklusif dan bermutu. Temuan ini menunjukkan adanya celah kebijakan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Lain halnya menurut Dea Mustika et al (2023) yang memberikan gambaran mengenai dampak pendidikan inklusif terhadap peserta didik. Mereka menekankan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya menguntungkan anak berkebutuhan khusus, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi peserta didik lain, seperti berkembangnya sikap empati dan toleransi. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa kesiapan guru menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusif. Jika dikaitkan dengan literatur sebelumnya,

dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kapasitas aktor pelaksana di tingkat sekolah, khususnya guru.

Dilain sisi Aminah Saing et al., n.d mengaitkan pendidikan inklusif dengan konsep keadilan sosial dan budaya. Analisis mereka menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan merupakan refleksi dari ketidakadilan sosial yang lebih luas, seperti ketimpangan ekonomi, gender, dan wilayah. Perspektif ini memperkaya diskursus pendidikan inklusif dengan menempatkannya dalam konteks sosial yang lebih luas. Pendidikan inklusif tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya integrasi peserta didik berkebutuhan khusus, melainkan sebagai strategi untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan setara.

Berdasarkan seluruh literatur yang telah di kaji oleh penulis bahwa semua sepakat bahwa pendidikan inklusif memiliki peran penting sebagai solusi atas kesenjangan pendidikan yang terjadi. Namun, terdapat perbedaan penekanan antar penelitian. Sebagian literatur menitikberatkan pada aspek kebijakan, sementara yang lain lebih menyoroti implementasi pembelajaran dan faktor sosial budaya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif merupakan isu multidimensional yang tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal.

Analisis literatur juga menunjukkan bahwa tantangan utama pendidikan inklusif terletak pada implementasi yang belum merata. Keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan guru, serta resistensi sosial masih menjadi hambatan yang sering muncul dilapangan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi, melibatkan berbagai aktor dalam masyarakat seperti pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat secara luas.

4. KESIMPULAN

Pendidikan inklusif mempunyai potensi besar untuk bisa mengurangi kesenjangan pendidikan khususnya di Indonesia, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan yang ada, kesiapan sumber daya manusia, serta kesadaran sosial eksekutor terhadap pentingnya keadilan dalam pendidikan. Analisis *literature review* ini juga memperlihatkan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya agenda pendidikan, melainkan bagian dari upaya pembangunan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan inklusif secara sistematis dan berkelanjutan sehingga mampu menjawab tantangan kesenjangan pendidikan di Indonesia. Akses pendidikan inklusif bagi masyarakat miskin di Indonesia merupakan persoalan struktural yang membutuhkan pendekatan multidimensional. Berbagai literatur yang ada cenderung menekankan hanya pada aspek kebijakan dan akses formal, namun masih relatif terbatas dalam mengkaji pengalaman belajar dan kualitas pembelajaran peserta didik miskin dalam konteks pendidikan inklusif. Sehingga masih terdapat gap penelitian yang penting untuk

dikembangkan di kemudian hari, yakni kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi pendidikan inklusif pada level praksis dan dampaknya terhadap mobilitas sosial masyarakat miskin. Selain itu, Kajian literatur menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan tidak hanya bersumber dari keterbatasan akses fisik pada lembaga pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan kualitas layanan, distribusi sumber daya, serta kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif muncul sebagai pendekatan yang dianggap paling relevan untuk menjawab persoalan tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faiza, A. P. A., Fitri, N. L., Tsany, A., & Aqilah, A. F. (2025). Eksklusi Sosial dalam Pendidikan. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 3(1), 46–59. <https://doi.org/10.59001/pjier.v3i1.198>
- Alvani, D. A., & Indriyani, N. (2024). Menuju Sistem Pendidikan Yang Lebih Inklusif. *Journal Of Information Systems And Management*, 03(01). <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.496>
- Aminah Saing, S., Maruapey, H., Santoso, G., Muhammadiyah Jakarta, U., & Muhammadiyah Aimas, S. (n.d.). *Eksplorasi Peran Keadilan Sosial dan Budaya Dalam Menciptakan Lingkungan Pendidikan Yang Inklusif*.
- Dea Mustika, Agnes Yurika Irsanti, Evi Setiyawati, Fretika Yunita, Nurhafizdah Fitri, & Putri Zulkarnaini. (2023). Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 41–50. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1575>
- Efendi, M. H., & Aini, N. (2025). *Ketimpangan Sosial Ekonomi dan Akses Pendidikan: Studi Kasus Masyarakat Marginal* (Vol. 1, Issue 2). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/ics>
- Fatmawati et al, F., Fatmawati, F., Fadillah, N., Faizi, A., Kurnia, H., Kurnia Grup, C., DIY Tegalsari, B., Lor, K., Tengah Mentosari, J., Tengah Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, K., Keguruan dan Ilmu Pendidikan, F., Pamulung, U., & Tangerang Selatan, K. (2025). Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu. *J Innovations in Multidisciplinary Education Journal*, 2(1), 1–7.
- Firnanda, R., Nurviana, D., Fathul Aziz, F., & Shafa Diani, F. (2025). *Jurnal Edukasi dan Literasi Pendidikan*. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jelp>
- Iffani, M., & Pitoyo, A. J. (2017). *Akses Pendidikan Dasar Untuk Anak Keluarga Miskin Di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul*.
- Judijanto, L., Prananda, G., Naofal, M., & Ayu, D. H. (2025a). The Education and Social Justice: A Phenomenological Review of Educational Access Disparities in Developing and Developed Countries. *The Future of Education Journal*, 4, Page. <https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index>
- Judijanto, L., Prananda, G., Naofal, M., & Ayu, D. H. (2025b). The Education and Social Justice: A Phenomenological Review of Educational Access Disparities in Developing and Developed Countries. *The Future of Education Journal*, 4, Page. <https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index>

- Lewa, M. J. (2025). Pendidikan Inklusif: Hak Pendidikan bagi Semua Anak Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 2(1b), 2541–2545. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2960>
- Ompusunggu, A. R. I., Achidiani, Y., & Permata Nastia, G. I. (2023). Inclusive Education as an Alternative to Improve Access to Education for Children with Disabilities in Society. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 2(3), 6. <https://doi.org/10.47134/jpn.v2i3.1528>
- Ummah, F. Z. (2024). Mengatasi kemiskinan: Memahami akar masalah, tantangan global, dan solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. In *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN* (Vol. 2, Issue 11). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Vega, A., Vanezha, I., Agustia, J., Rizqi, M., & Uzdah, R. (2024). Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia. In *Jl. Semarang* (Vol. 1, Issue 2). JLI.